

RINGKASAN EKSEKUTIF STRATEGI DAN RENCANA AKSI KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI SUMATERA SELATAN/ SeHati Sumsel (2017-2021)

EXECUTIVE SUMMARY OF SOUTH SUMATRA BIODIVERSITY STRATEGY
AND ACTION PLAN/SSBSAP (2017-2021)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Palembang, Mei 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF STRATEGI DAN RENCANA AKSI KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI SUMATERA SELATAN/ SeHati Sumsel (2017-2021)

EXECUTIVE SUMMARY OF SOUTH SUMATRA BIODIVERSITY STRATEGY
AND ACTION PLAN/SSBSAP (2017-2021)



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Kehutanan
Jl. Kol. H. Burlian KM. 6,5 Pundi Kayu
Palembang
Telp. 0711 411476, 0711 411479
Palembang

Didukung oleh :
GIZ Bioclime
Biodiversity and Climate Change Project
Jl. Jend Sudirman KM. 3,5 No. 2837
Palembang
Telp & Fax. 0711 353176
www.bioclime.org

Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2021)

South Sumatra Biodiversity Strategy and Action Plan/SSBSAP (2017-2021)

©2017 Provinsi Sumatera Selatan

Diterbitkan oleh:

Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2021) disusun atas kerjasama Provinsi Sumatera Selatan dengan GIZ BIOCLIME Project. Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi semua pihak (lembaga maupun personal) yang telah berkontribusi data, pustaka, maupun pikiran dan gagasannya dalam penyusunan dokumen ini.

ISBN:

Penyelaras Akhir:

Ellyn K. Damayanti, Lilik B. Prasetyo

Tim Penulis: Syafrul Yunardy, Adi Kunarso, Arif Wibowo, Asep Ayat, Dafid Pirnanda, Indra Yustian, Jun Harbi, Kiagus Abdul Kodir, Lulu Yuningsih, Octavia Susilowati, Samsul Bachri, Elva Gemita, Hilda Zulkifli, Zulfikhar, Muallimah Gustini, Lilik B. Prasetyo, Ellyn K. Damayanti, Hendi Sumantri, Rendra Bayu Prasetyo, Berthold Haasler.

Pendukung: Andi F. Yahya, Syahru Rhamdoni, Irene C. Fatmayanti

Kontributor:

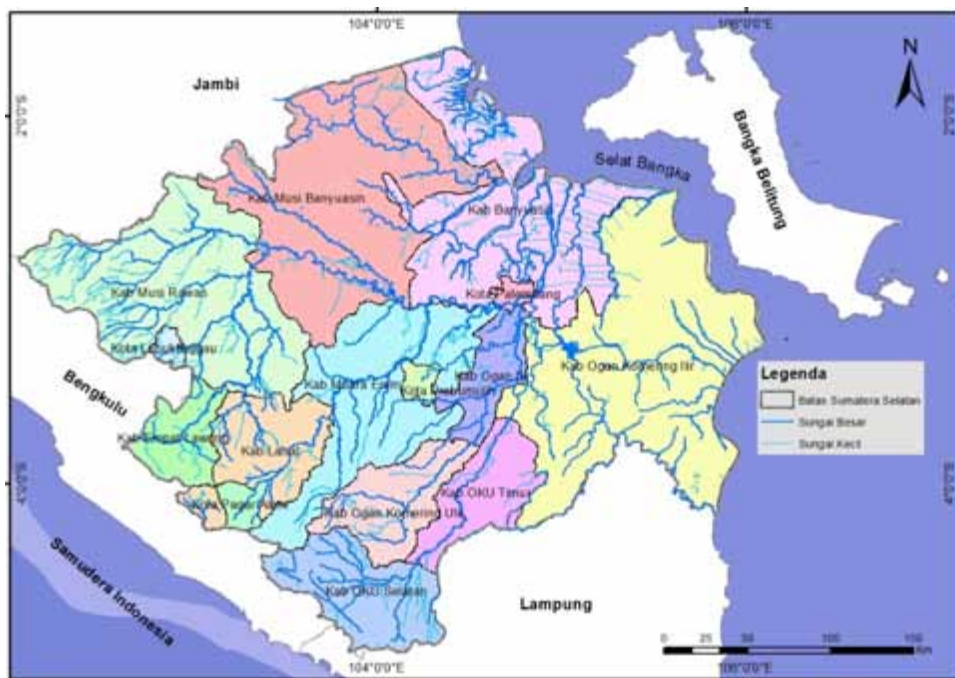
Kelompok Kerja : Dinas Kehutanan Sumatera Selatan; Bappeda Sumatera Selatan; Dinas Perkebunan Sumatera Selatan; Badan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan; Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan; Balitbangnovda Sumatera Selatan; BKSDA Sumatera Selatan; Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang; Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat; Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U); BP2LHK Palembang; BP DAS dan HL Musi; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel; Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I; KPHP Meranti; KPHP Lalan; KPHL Banyuasin; Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya; Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya; Prodi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Palembang; Burung Indonesia, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI); ZSL Indonesia; LAMA-I; GAPKI Sumatera Selatan; APHI Sumatera Selatan; Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor; Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bogor.

Ringkasan Eksekutif

Keanekaragaman hayati (kehati) sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan, sandang, papan, kosmetika, obat-obatan dan berperan dalam menjaga sistem penyangga kehidupan di bumi. Akan tetapi keanekaragaman hayati tersebut mendapat tekanan berbagai faktor langsung (*pressure*) dan tidak langsung (*drivers*), sehingga terancam punah. Pada tataran global, inisiatif perlindungan kehati diwujudkan dalam wujud komitmen untuk mengkonservasi kehati dalam bentuk penandatanganan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) pada tahun 1992. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi CBD dengan menerbitkan UU No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Sebagai tindak lanjut dari komitmen melindungi kehati, pemerintah menerbitkan *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) pada tahun 2003 yang diperbaharui pada tahun 2016. Buku Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan 2017 - 2020 (SeHati Sumsel) ini dimaksudkan untuk menerjemahkan dokumen IBSAP tersebut agar dapat diimplementasikan pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini disusun secara partisipatif oleh berbagai pihak melalui proses Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*) dan Proses Konsultasi Publik (*Public Consultation*).

KONDISI FISIK, SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai luas 87.421,17 km², yang terbagi menjadi 13 kabupaten dan empat kota, dengan 231 kecamatan, 2.859 desa dan 377 kelurahan, yang terletak pada rentang ketinggian dari 0 hingga 3.144 m dpl. Provinsi ini beriklim tropika basah. Intensitas curah hujan tahunan rata-rata sangat tinggi berkisar dari 2.000-4.000 mm. Daerah yang terletak pada elevasi tinggi dan bergunung cenderung mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Beberapa sungai besar bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi (Gambar 1).



Gambar 1. Peta administrasi dan Jaringan sungai Provinsi Sumatera Selatan

Bentang alam Sumatera Selatan terbagi menjadi lima zonasi, yaitu zona pantai (marin), rawa, dataran, transisi, dan pegunungan. Kawasan pantai timur Sumatera Selatan terdiri atas rawa-rawa yang sebagian bergambut dan perairan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada zona pantai ke arah barat merupakan dataran rendah yang luas yang berada pada ketinggian di bawah 1.000 m. Pada zona ini didominasi jenis tanah latosol, sedangkan di daerah kanan kiri sungai merupakan daerah endapan alluvial yang sangat subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Pada zona transisi pada ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam. Pada zona pegunungan, puncak tertinggi pada Bukit Barisan terdiri dari puncak Gunung Dempo (>3.000 m), Gunung Bungkok (2.125 m), Gunung Seminung (1.964 m), dan Gunung Patah (1.107 m dpl). Pada zona ini terutama pada daerah kerucut vulkan dapat ditemukan tanah andosol yang subur. Selain itu Sumatera Selatan juga kaya akan minyak, semenjak jaman penjajahan dahulu.

Dengan sumberdaya lahan, perairan yang melimpah dan iklim yang cocok, semenjak dahulu Sumatera Selatan merupakan lumbung tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) dan pusat produksi berbagai komoditas diantaranya kayu, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi dan lada yang dipasarkan di dalam dan ke luar negeri. Sektor peternakan dan perikanan juga memegang peran penting. Produksi komoditas tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peran ekonomi sektor pertanian pada PDRB provinsi ini sangat besar (19,1%), menempati posisi kedua setelah Pertambangan dan Pengalihan (21,8%). Sedangkan industri pengolahan memberikan kontribusi di bawah sektor pertanian (18,4%). Walaupun demikian, kelebihan sumberdaya tersebut belum mampu dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat, karena masih dijumpai angka kemiskinan dan pengangguran yang kurang lebih masing-masing mencapai 5,25% dan 5%. Sebagian masyarakat di Sumatera Selatan dalam bertani/berkebun masih menggunakan cara tradisional, misalnya sonor dan

perladangan berpindah, yang dahulu diatur dengan menggunakan pranata hukum adat (Simbu Cahaya). Namun saat ini telah mengalami pergeseran karena disebabkan oleh perubahan status kepemilikan lahan, meningkatnya jumlah populasi, pola pendidikan, dan penegakan hukum adat.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sembilan kawasan konservasi yang secara spasial tidak saling terhubung, yaitu Taman Nasional Sembilang (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Suaka Margasatwa Bentayan (SM Bentayan), Suaka Margasatwa Dangku (SM Dangku), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (SM Gumai Pasemah), Suaka Margasatwa Gunung Raya (SM Gunung Raya), Suaka Margasatwa Isau-isau Pasemah (SM Isau-isau Pasemah), Suaka Margasatwa Padang Sugihan (SM Padang Sugihan), dan Taman Wisata Alam Pundi Kayu (TWA Pundi Kayu).

STATUS DAN KECENDERUNGAN PERUBAHAN EKOSISTEM SERTA KEANEKARAGAMAN HAYATI

Provinsi Sumatera Selatan memiliki hampir seluruh tipe ekosistem yang terdaftar dalam IBSAP, kecuali ekosistem padang lamun, ekosistem karst, hutan kerangas, savanna, hutan sub alpin, dan nival. Ada tambahan dua tipe ekosistem buatan yang diidentifikasi selain yang telah terdaftar di dalam IBSAP, yaitu ekosistem Hutan Tanaman Industri (HTI) dan ekosistem perkebunan. Namun demikian, dalam proses penyusunan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2020) ini, beberapa informasi terkait ekosistem tertentu belum dapat dikumpulkan dan akan menjadi salah satu rencana aksi yang dilakukan untuk melengkapi informasi ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, yaitu: ekosistem marin (perairan laut dan terumbu karang), ekosistem riparian, dan ekosistem danau rawa banjir. Sedangkan jumlah spesies keanekaragaman hayati tumbuhan yang telah berhasil didaftarkan berjumlah 877 spesies tumbuhan (Lampiran 10 dalam dokumen SeHati Sumsel), keanekaragaman hayati satwa terdiri dari 65 spesies amfibi, 71 spesies reptilia, 81 spesies mamalia (11 spesies primata; 70 spesies non-primata), 334 spesies burung/aves, dan 133 spesies arthropoda (Lampiran 11 dalam dokumen SeHati Sumsel), dan biota perairan yang terdiri dari 270 spesies ikan, 75 spesies zooplankton, 66 spesies perifiton, 79 spesies zoobenthos (Lampiran 12 dalam dokumen SeHati Sumsel).

Ekosistem Alami

Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Pegunungan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai tipe ekosistem alami dan buatan yang menyimpan berbagai kehati yang sangat bermanfaat secara ekologis, sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Pada ekosistem alami terdapat ekosistem sungai/riparian, danau, dan hutan alam yang terbentang dari dataran rendah (0-1.200 mdpl), hutan pegunungan bawah (1.200 - 2.500 mdpl), hutan pegunungan atas (2.500-3.000 mdpl) dan Sub Alpin (>3.000 m dpl). Secara lebih detail, ekosistem hutan dataran rendah dapat dibedakan menjadi hutan lahan kering, hutan rawa, dan hutan mangrove. Pada ekosistem buatan terdapat ekosistem pertanian, perkebunan, agroforestri, dan hutan tanaman.

Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Planologi Kehutanan, hutan dataran rendah pada tahun 2000 mencapai 11.25 % dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau sebesar 0,99 juta Ha, namun luasan ini terus menurun hingga mencapai 7,5% atau 0,65 juta hektar. Laju kehilangan hutan dataran rendah berkisar 22,500 hektar per tahun. Selain luasannya menyusut, hutan dataran rendah juga terfragmentasi menjadi beberapa kelompok hutan. Bila dicermati lebih dalam, hutan lahan kering telah mengalami penurunan yang konsisten sejak 2000, hutan rawa sejak 2009 sedangkan hutan mangrove relatif tetap, namun dengan kualitas yang lebih rendah (mangrove sekunder). Berbeda dengan hutan alam, sejak tahun 2000, hutan tanaman terus mengalami kenaikan (Gambar 2). Kehilangan hutan di dataran hutan sudah terjadi semenjak dahulu kala. Hal ini disebabkan kesuburan dan akses yang mudah dicapai dengan menggunakan jalan yang dibangun oleh perusahaan konsesi kehutanan dan pertambangan.

Berdasarkan hasil olahan data digital SK No. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 dan Peta Penutupan Lahan Indonesia 2015, ekosistem hutan dataran rendah tersebut berada dalam kawasan hutan lindung/HL (13%) yang 32%-nya berhutan; hutan produksi tetap/HP (54%) yang hanya 4%-nya berhutan, hutan produksi terbatas/HPT (7%) yang 31%-nya berhutan, hutan produksi yang dapat dikonversi/HPK (5%) yang 100% tidak berhutan, dan hutan konservasi/HK/KSA-KPA (21%) yang 49%-nya masih berhutan. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 19% dari ekosistem hutan dataran rendah di dalam kawasan hutan negara di Provinsi Sumatera Selatan yang masih berhutan. Namun demikian, ekosistem hutan dataran rendah yang masih berpenutupan hutan alam sebagian besar berada di kawasan hutan produksi S. Kapas-Meranti dan kawasan Suaka Margasatwa Danguku dan berupa hutan alam yang tersisa (*remnant forest*).

Hutan pegunungan bawah hanya terdiri dari hutan lahan kering. Tekanan terhadap hutan ini relatif kecil dibandingkan dengan hutan dataran rendah, selain karena akses yang terbatas juga karena status hutan ini sebagian besar adalah hutan untuk fungsi konservasi, sehingga 82% luasannya masih berupa hutan. Selama periode 2000 – 2015 terjadi deforestasi sebesar kurang lebih 6.900 hektar, atau kurang lebih 460 hektar per tahun. Ekosistem hutan pegunungan berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, meliputi kawasan hutan lindung (63.99%), hutan konservasi (35.66%), dan hutan produksi terbatas (0.02%). Puncak tertinggi adalah Gunung Dempo yang berada dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Dempo. Kawasan konservasi yang memiliki ekosistem hutan pegunungan, yaitu SM Gunung Raya, SM Gumai Pasemah, SM Isau-isau Pasemah, dan TN Kerinci Seblat.

Tipe hutan dominan setelah hutan lahan kering adalah hutan rawa. Tipe hutan ini dikonversi/eksploitasi setelah terbatasnya ketersediaan hutan lahan kering. Pada periode 2000 – 2015, sebagian besar hutan rawa telah dirubah menjadi pertanian lahan kering, perkebunan sawit, hutan tanaman industri (*Acacia crasicarpa*) dan lahan terlantar berupa lahan terbuka dan semak belukar (Gambar 2).



Gambar 2. Kecenderungan perubahan luas hutan dataran rendah di Provinsi Sumatera Selatan

Ekosistem hutan dataran rendah dan pegunungan merupakan rumah bagi hampir seluruh spesies fauna yang berhasil didaftarkan selama proses penyusunan dokumen SeHati Sumsel, dengan jumlah total 1.174 spesies, baik yang hidup di darat, di air, maupun di dua alam. Di antara seluruh spesies tersebut, beberapa spesies penting bagi Sumatera Selatan adalah: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae* Pocock, 1929), Gajah (*Elephas maximus ssp. sumatranus* Temminck, 1847), Tapir (*Tapirus indicus* Desmarest, 1819), Pelanduk Jawa (*Tragulus javanicus* Osbeck, 1765), Beruang Madu (*Helarctos malayanus* Raffles, 1821), Siamang (*Symphalangus syndactylus* Raffles, 1821), Tarsius Bangka (*Tarsius bancanus ssp. bancanus* Hill, 1955), Buaya Sinyulong (*Tomistoma schlegelii* Müller, 1838), Burung Migran/Bangau Storm (*Ciconia stormi* Blasius, 1896), Burung Raja Udang (*Alcedo meninting* Horsfield, 1821), Elang Bondol (*Haliastur indus* Boddaert, 1783), Elang Laut (*Haliaeetus leucogaster* Gmelin, 1788), Elang Ular Bido (*Spilornis cheela* Latham, 1790), Enggang Gading (*Rhinoplax vigil* Forster, 1781), Kuau Raja (*Argusianus argus* Linnaeus, 1766), Ikan Belida (*Chitala lopis* Bleeker, 1851), Ikan Semah (*Tor douronensis* Valenciennes, 1842), Ikan Sembilang (*Plotosus canius* Hamilton, 1822), dan Ikan Tapah (*Wallagonia leeri* Bleeker, 1851).

Ekosistem Hutan Mangrove

Ekosistem mangrove di Sumatera Selatan yang terbentuk dari hamparan Rhizophora, Avicenia, Nipah dan Nibung mempunyai peran sangat penting dalam menahan abrasi pantai, mitigasi perubahan iklim global karena menyimpan karbon terestrial dan menjadi habitat bagi berbagai jenis satwaliar penting diantaranya harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), kucing bakau (*Felis bengalensis*), macan dahan (*Neofelis nebulosa*), lutung kelabu (*Presbytis cristata*), ungko (*Hylobates agilis*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), beruk (*Macaca nemestrina*), musang air (*Cyanogale bennettii*), berang-berang (*Lutra lutra*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), dan buaya sinyulong (*Tomistoma schlegelii*). Selain itu di ekosistem ini terdapat sekitar 112 spesies burung, sebanyak 44 spesies di antaranya menggunakan kawasan mangrove sebagai habitat utama, 22 spesies yang terikat dengan kawasan mangrove, dan lebih dari 25 spesies burung air migran,

termasuk Trinil-lumpur Asia (*Limnodromus semipalmatus*), Trinil Nordmann (*Tringa guttifer*), Gajahan Timur (*Numenius madagascariensis*), dan spesies dara laut (*Sternidae*).

Hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di sepanjang pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin, terutama di hutan lindung dan kawasan Taman Nasional Sembilang yang diperkirakan seluas 83.447 hektar. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ekosistem ini adalah gangguan dari aktivitas masyarakat. Pada periode 2000-2015, terjadi degradasi dan konversi hutan mangrove menjadi hutan tanaman, lahan pertanian dan tambak. Konversi lahan untuk tambak udang secara ilegal juga diperkirakan telah memusnahkan 18% dari sabuk mangrove di sekitar Semenanjung Banyuasin selama 1995-2000. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional di Tanjung Api-Api menyebabkan perubahan dan dampak langsung pada ekosistem hutan mangrove seluas 4.000 hektar yang memiliki nilai ekologis penting bagi perikanan masyarakat setempat. Pada kurun 2000 – 2015, hutan ini tidak banyak berubah. Hanya sebagian kecil yang dikonversi menjadi lahan pertanian dan tambak

Ekosistem Hutan Pantai

Ekosistem hutan pantai dapat dijumpai di TN Sembilang, namun rincian luasnya tidak diketahui, karena mungkin dimasukkan sebagai ekosistem mangrove. Ekosistem ini mempunyai fungsi sangat penting diantaranya sebagai pelindung ekosistem daratan dari tsunami, terpaan angin, abrasi pantai dan sebagai habitat tumbuhan dan satwa liar. Berbeda dengan ekosistem mangrove, ekosistem ini tumbuh pada daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu dan berada pada garis pasang tertinggi. Ekosistem hutan pantai terdiri dari formasi *Pescaprae* dan formasi *Barringtonia*. Tumbuhan yang dapat dijumpai pada ekosistem ini diantaranya *Barringtonia speciosa*, *Terminalia catappa*, *Calophyllum inophyllum*, *Hibiscus tiliaceus*, *Thespesia populnea*, *Casuarina equisetifolia*, *Pisonia grandis* dan *Ipomea pescaprae*. Tumbuhan *C. inophyllum* berpotensi dapat dikembangkan menjadi penghasil bioenergi.

Ekosistem Sungai dan Danau

Ekosistem riparian adalah ekosistem yang terbentuk di kanan kiri sungai. Ekosistem ini sangat penting karena mempunyai berbagai fungsi ekologis, diantaranya : (a) sebagai habitat dan koridor flora fauna, fungsinya akan sangat terlihat pada saat musim kemarau, (b) mencegah aliran permukaan masuk ke dalam sungai sehingga mengurangi total suspended solid (TSS) yang masuk ke perairan. Dengan menggunakan buffer sungai sepanjang 100 m, total areal riparian di Sumatera Selatan seluas 195.757.4 hektar. Pada saat ini kondisi riparian sangat buruk karena hanya 8.7% (17.089 Ha) saja yang masih berhutan dan selebihnya adalah perkebunan, semak belukar, lahan terbuka, pertambangan, pertanian lahan kering dan sawah, dan pemukiman. Dibandingkan dengan tahun 2000, luas hutan di riparian menurun sebanyak 1.6 %.

Sistem sungai yang terbesar dan terkompleks di Sumatera Selatan adalah Sungai Musi. Sungai Musi bagian hulu bersumber air berasal dari pegunungan Bukit Barisan dan Danau Ranau kemudian mengalir ke bagian tengah dan hilir ke arah timur melewati kota Palembang, dan selanjutnya

bermuara di Selat Bangka. Panjang sungai tersebut adalah sekitar 700 km. Memiliki beberapa cabang sungai antara lain Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tebir, Batang Sumai, Batang Merangin, Batang Buyo dan Sungai Alai.

Sumatera Selatan adalah region dengan biodiversitas ikan yang tinggi, paling tidak terdapat 233 spesies ikan terkelompok dalam 38 familia hanya dari Sungai Musi beserta anak-anak sungainya (Utomo, *et al.*, 2007; Husnah, *et al.*, 2008). Jenis ikan pada ekosistem rawa/rawa banjiran terdiri atau dua kelompok, yaitu kelompok ikan hitam (*black fish*) dan kelompok ikan putih (*white fish*). Contoh kelompok hitam, yaitu betook (*Anabas testudineus*), gabus (*Channa striata*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*) dan tembakang (*Helostoma temmenckii*). Contoh kelompok ikan putih, yaitu lais (*Cryptopterus spp.*), baung (*Mystus nemurus*), patin (*Pangasius spp.*), jelawat (*Leptobarbus hoeveni*) dan lampam (*Barbodes schwanefeldii*). Ekosistem perairan tawar di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi dan Sungai Lematang, juga menjadi habitat bagi salah satu jenis ikan pari air tawar raksasa (*Urogymnus polylepis*). Sebanyak delapan laporan tertangkapnya ikan pari air tawar ini di perairan Sumatera Selatan antara 2011-2016, empat di Sungai Musi, tiga di Sungai Lematang dan satu di Sungai Bungin.

Perairan Danau Ranau memiliki 17 jenis ikan. Jenis ikan tersebut merupakan jenis ikan yang sering ditangkap oleh nelayan sekitar. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 80% didominasi oleh lima jenis ikan saja, yaitu mujaer (*Oreochromis mossambicus*), arongan (*Hampala macrolepidota*), palau (*Osteochilus hasselti*), kepor (*Pristolepis fasciatus*), dan nila (*Oreochromis niloticus*). Sementara empat jenis ikan yang populasinya masih cukup banyak (12%) adalah baung (*Hemibagrus nemurus*), putak (*Notopterus notopterus*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*), dan kepiat (*Barbonymus schwanefeldii*). Hanya satu jenis (1%) yang terancam punah, yaitu ikan semah (*Tor sp*). Hal ini menunjukkan jenis ikan introduksi merupakan jenis ikan yang populasinya dominan.

Fitoplankton yang ditemukan di Danau Ranau sebanyak 28 genus, diantaranya 15 genus dari kelompok Bacillariophyceae, 7 genus dari Chlorophyceae, 2 genus dari Chrysophyceae dan 5 genus dari Cyanophyceae. Jumlah plankton per liter berkisar antara 349 – 2.333 sel (individu)/liter dengan nilai indeks keragaman (H') berkisar antara 1,803 – 2,662. Jenis yang dominan adalah *Ulothrix*, *Synedra*, *Surirella*, *Pinnularia*, *Navicula*, *Ankistrodesmus*, *Fragillaria*, *Anabaena*, *Eunotia*, *Aphanocapsa* dan *Cosmarium*. Berdasarkan komposisi, kelimpahan dan nilai indeks keragamannya, Danau Ranau memiliki tingkat kesuburan sedang dengan kualitas perairan tercemar ringan sampai tidak tercemar.

Ekosistem Rawa Lebak

Ekosistem rawa merupakan lahan yang menempati posisi peralihan antara daratan dan perairan, selalu tergenang sepanjang tahun atau selama kurun waktu tertentu, genangannya relatif dangkal, dan terbentuk karena drainase yang terhambat. Tipologi atau klasifikasi lahan rawa dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu tipologi berdasarkan kekuatan pasang dan arus sungai, dan tipologi berdasarkan jenis dan kondisi tanah. Jenis tipologi lahan terbesar di Sumatera Selatan, yaitu lahan rawa yang meliputi rawa lebak dan rawa pasang surut.

Pada saat ini jasa ekosistem rawa lebak telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, sumber air baku, peternakan, pertanian, transportasi. Kawasan ekosistem lahan rawa lebak lebih banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI), seperti rawa lebak Pampangan (OKI) dan Pemulutan (OI).

Ekosistem rawa lebak sangat kaya kehati padi lokal namun jumlahnya semakin menurun. Pada tahun 2001 ditemukan 19 varietas, namun pada tahun 2015 hanya ditemukan 10 varietas diantaranya SiPutih, Kawo, Sania, Pelita, Rampak, Boneng, Sanapi, Sawah Kanyut, Siam dan Sawah Kemang. Sumber Daya Genetik Tanaman Padi Lokal Spesifik dapat ditemukan di Desa Batu Ampar, Kijang Ulu, Kayuagung, Pematang Beluran, Jejawi (Ogan Komering Ilir), Tanjung Alai, Tanjung Menang, Muaro Baru, Lebak Laut, Sakatiga, Talang Balai Baru, Sukapindah, Muara Penimbung, Ulak kerbau (Ogan Ilir). Faktor yang mempengaruhi ekosistem ini adalah kebakaran hutan dan lahan.

Ekosistem Rawa Pasang Surut

Ekosistem rawa pasang surut adalah ekosistem lahan basah yang utamanya dicirikan oleh rezim air yang mengalami fluktuasi akibat pasang dan surutnya air dari laut/sungai sekitar. Lahan rawa pasang surut dapat dibedakan menjadi tanah mineral dan tanah gambut. Tanah mineral adalah tanah yang terbentuk oleh proses pedogenik, berupa endapan liat, debu, dan sebagian pasir yang berupa alluvial sungai atau marin (laut). Sedangkan tanah gambut terbentuk oleh adanya proses geogenik berupa akumulasi sisa tanaman baik yang sudah mati baik terdekomposisi (matang) maupun belum terdekomposisi (mentah). Dua jenis tanah ini mempunyai sifat dan watak baik fisik, kimia, maupun biologi yang berbeda sehingga mempunyai potensi yang berbeda. Sifat-sifat tanah yang berbeda tersebut diantaranya adalah kadar bahan organik, kadar air, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, dan ketersediaan hara bagi tanaman. Keberagaman karakteristik lahan rawa pasang surut tersebut di atas membawa konsekuensi terhadap biodiversitas dan kearifan lokal petani dalam menyasiasi kondisi alam rawa. Faktor yang mengancam ekosistem ini adalah kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau.

Ekosistem ini tersebar di pantai timur wilayah provinsi Sumatera Selatan yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Vegetasi asli berupa tumbuhan *Palmae/sagu* dan hutan kayu rawa, namun saat ini sebagian besar kawasan rawa pasang surut tersebut sudah dibuka menjadi lokasi persawahan untuk pertanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, cabai rawit, tomat, terung, pare, timun, gambas, buncis, bayam serta tanaman sayur-sayuran sagu oleh masyarakat.

Ekosistem Rawa Gambut

Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik yang terdapat di lantai hutan lahan basah. Secara alami, tanah gambut terdapat pada lapisan tanah paling atas, sedangkan di lapisan bawah terdapat lapisan tanah aluvial pada kedalaman yang bervariasi. Disebut sebagai lahan gambut apabila ketebalan gambut lebih dari 50 cm. Luas lahan rawa gambut di Sumatera Selatan berdasarkan pemutakhiran peta sebaran lahan gambut terbitan Wetland International Program (2005)

tercatat 1.262.385 hektar yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (768.501 Ha), Musi Banyuasin (593.311 Ha), Muara Enim (24.104 Ha) dan Musi Rawas (34.126 Ha). Lahan gambut tersebut tersebar tidak hanya di kawasan lindung dan konservasi tetapi juga di hutan produksi, misalnya HP Simpang Heran-Beyuku, HP Mesuji dan HP Pedamaran di Kabupaten OKI dengan luas sekitar 617.350 ha, dan Kelompok Hutan Produksi Sungai Lalan dan Mangsang-Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin dengan luas ± 331.304 ha. Hutan rawa gambut didominasi Meranti (*Shorea* sp), Jelutung (*Dyera lowii*), Terentang (*Camnosperma coriaceum*), Pulai (*Alstonia pneumatophora*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), dan Kempas (*Koompasia* sp).

Kawasan ekosistem gambut yang penting di provinsi ini adalah Ekosistem Hutan Rawa Gambut Merang – Kepayang, Air Sugihan dan kawasan Sembilang (Taman Nasional Berbak dan Sembilang). Ekosistem Hutan Rawa Gambut Merang – Kepayang merupakan perwakilan dari hutan rawa gambut alami yang masih tersisa di Sumatera dan penyimpan karbon yang sangat penting. Ekosistem ini juga berperan sangat penting sebagai koridor satwa yang berlalu lalang diantara Taman Nasional Sembilang dan Taman Nasional Berbak. Beberapa jenis satwa penting, antara lain jenis mamalia besar, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Tapir asia (*Tapirus indicus*) dan Beruang madu (*Helarctos malayanus*), 27 jenis burung, dan 57 spesies ikan. Sedangkan flora ditemukan sebanyak 178 spesies dari 42 suku.

Ekosistem Buatan

Hutan Tanaman Industri

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sumatera Selatan (2013), luas konsesi HTI di Sumatera Selatan mencapai 1.330.270 ha, yang dimiliki oleh 19 perusahaan IUPHHK-HTI. Pembangunan hutan tanaman industri di Sumatera Selatan selama ini diarahkan untuk menyediakan kebutuhan industri *pulp and paper*. Areal HTI di Sumatera Selatan tersebar di kabupaten antara lain Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lahat, Musirawas dan Musirawas Utara. Beberapa perusahaan besar HTI di Sumatera Selatan antara lain PT. Musi Hutani Persada (PT. MHP) dan perusahaan dari Grup Sinar Mas yaitu PT. Rimba Hutani Mas, PT. Bumi Persada Permai, PT. Sumber Hijau Permai, PT. Tripupa Jaya, PT. Bumi Andalas Permai, PT. Sebangun Bumi Andalas dan PT. Bumi Mekar Hijau. Pada ekosistem hutan tanaman, spesies pohon yang dominan adalah *Acacia mangium*, diikuti *Eucalyptus pellita*, *Gmelina arborea* dan *Macaranga peltata*. Sedangkan di bawah tegakan hutan tanaman dapat ditemukan antara lain lengkenai (*Selaginella opaca*), rumput emprit (*Cyrtococcum acrescens*), paku hata (*Lygodium circinatum*), katoman (*Chromolaena odorata*), paku harupat (*Nephrolepis biserata*), meniran (*Phyllanthus niruri*) dan alang-alang (*Imperata cylindrica*). Sedangkan pada area High Conservation dapat ditemukan) ditemukan jenis *Dipterocarpus elongatus*, *Hopea mengerawan*, *Shorea platycarpa*, dan *Shorea balangeran*. *Shorea platycarpa* merupakan jenis terancam punah (*Critically Endangered*) menurut status IUCN Red List.

Perkebunan

Sejak pemerintahan kolonialisme Belanda, perkebunan sudah banyak dibangun di Sumatera Selatan. Perkebunan tersebut diantaranya Karet, Sawit, Kopi, Kelapa, Tebu, Lada, Kakao, Teh, Cengkeh,

Tembakau, Kemiri, Pinang, Kayu manis, Aren, Gambir, Kapuk, dan Vanili. Perkebunan dikelola baik oleh perusahaan ataupun masyarakat.

Perkebunan karet di Sumatera Selatan terdiri dari perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara (PBN), dan perkebunan besar swasta (PBS). Produksi diperkirakan sebanyak 29,83 persen dari total produksi karet nasional pada tahun 2016. Luas total areal perkebunan karet mencapai 812.586 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 839.815 hektar pada tahun 2016. Perkebunan rakyat (PR) tersebar di lima belas kabupaten, yaitu Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabumulih dan Palembang, dengan areal terluas di Kabupaten Muara Enim. Perkebunan besar negara (PBN) tersebar di dua kabupaten, yaitu Lahat dan Banyuasin. Sementara, Perkebunan besar swasta (PBS) tersebar di tujuh kabupaten, yaitu OKU, OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, dengan areal terluas di Kabupaten Lahat.

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Sumatera Selatan. Areal perkebunan sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2011 terdapat seluas 820.787 hektar dengan komposisi perusahaan tanaman, yaitu 49,51 persen dikelola oleh perusahaan swasta, 44,61 persen dikelola oleh rakyat, dan hanya 5,88 persen dikelola oleh rakyat. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan tersebut bertambah menjadi 923.002 hektar dan diperkirakan mencapai 1.064.373 hektar pada tahun 2016. Perkebunan rakyat (PR) tersebar di tujuh belas kabupaten, yaitu Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Muratara, Lubuk Linggau, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, PALI, Prabumulih dan Palembang. Perkebunan besar negara (PBN) tersebar di lima kabupaten, yaitu Lahat, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim dan OKU. Sementara, perkebunan besar swasta (PBS) tersebar di sepuluh kabupaten, yaitu Lahat, Empat Lawang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, OKU, OKU Timur, OKI, Ogan Ilir dan Muara Enim.

Perkebunan kopi di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR) dengan jenis kopi yang ditanam adalah robusta. Perkebunan tersebut tersebar di tiga belas kabupaten, yaitu Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Muara Enim dan Prabumulih. Luas total areal perkebunan kopi mencapai 249.293 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 250.172 hektar pada tahun 2016. Kabupaten OKU Selatan merupakan sentra penghasil kopi di Sumatera Selatan dengan areal seluas 70.799 hektar dan produksi kopi berasan sebesar 33.491 ton pada tahun 2014. Total produksi kopi berasan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 135.251 ton.

Perkebunan kelapa di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di tujuh belas kabupaten, yaitu Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Banyuasin, Pagar Alam, Prabumulih, Lubuk Linggau, Palembang, Muratara dan PALI. Luas total areal perkebunan kelapa mencapai 65.308 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 70.364 hektar pada tahun 2016. Total produksi kopra pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 63.679 ton. Kabupaten Banyuasin merupakan sentra penghasil kopra di Sumatera Selatan.

Perkebunan tebu di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat, negara dan swasta. Perkebunan tebu yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR) tersebar di Kabupaten OKI, Ogan Ilir dan OKU Timur. Sementara perkebunan besar negara (PBN) tersebar di Kabupaten Ogan Ilir dan perkebunan besar swasta (PBS) di OKU Timur. Luas total areal perkebunan tebu mencapai 21.593 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 20.730 hektar pada tahun 2016. Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur merupakan sentra perkebunan tebu di Sumatera Selatan. Perkebunan tebu di Sumatera Selatan memasok sekitar 100.384 ton atau 3,88 persen dari total produksi gula hablur nasional sebesar 2.579.173 ton pada tahun 2014.

Perkebunan lada di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di sembilan kabupaten, yaitu OKU, OKI, OKU Selatan, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Pagar Alam. Luas total areal perkebunan lada mencapai 10.350 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 10.436 hektar pada tahun 2016. Kabupaten OKU Selatan merupakan sentra penghasil lada di Sumatera Selatan dengan areal seluas 3.778 hektar dan produksi lada kering sebesar 3.781 ton pada tahun 2014. Total produksi lada kering pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 9.291 ton.

Perkebunan kakao di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di tiga belas kabupaten, yaitu Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Muara Enim dan Musi Rawas Utara. Luas total areal perkebunan kopi mencapai 10.218 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 11.093 hektar pada tahun 2016. Kabupaten Lahat merupakan sentra penghasil kakao di Sumatera Selatan dengan areal seluas 4.145 hektar dan produksi biji kakao kering sebesar 1.531 ton pada tahun 2014. Total produksi biji kakao kering pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 3.485 ton.

Perkebunan teh di Sumatera Selatan dikelola oleh negara dalam bentuk perkebunan besar negara (PBN). Perkebunan tersebut tersebar di Kabupaten Pagar Alam dengan total areal seluas 1.429 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 1.437 hektar pada tahun 2016. Total produksi daun teh kering pada tahun 2013 mencapai 1,390 ton dan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 3.032 ton atau 1,96 persen dari total produksi daun teh kering nasional sebesar 154.688 ton .

Perkebunan cengkeh di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di empat kabupaten, yaitu Lahat, Pagar Alam, OKU Selatan dan Muara Enim. Luas total areal perkebunan cengkeh mencapai 208 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 269 hektar pada tahun 2016. Total produksi bunga cengkeh kering pada tahun 2013 mencapai 51 ton dan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 55 ton.

Perkebunan tembakau di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di tiga kabupaten, yaitu OKU Timur, OKU Selatan dan Lubuk Linggau. Luas total areal perkebunan tembakau mencapai 53 hektar pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 367 hektar pada tahun 2016. Total produksi daun tembakau kering pada tahun 2013 mencapai 38 ton dan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 306 ton.

Perkebunan kemiri di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Muara Enim, OKU Timur dan OKU Selatan. Luas total areal perkebunan kemiri mencapai 2.957 hektar pada tahun 2012 dan menjadi 2.964 hektar pada tahun 2014. Total produksi biji kemiri kering pada tahun 2012 mencapai 1.730 ton dan pada tahun 2014 sebesar 1.737 ton.

Perkebunan pinang di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di sembilan kabupaten, yaitu Lahat, Musi Rawas, OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih dan Palembang. Luas total areal perkebunan pinang mencapai 1.638 hektar pada tahun 2012 dan menjadi 1.535 hektar pada tahun 2014. Total produksi biji pinang kering pada tahun 2012 mencapai 909 ton dan pada tahun 2014 sebesar 792 ton.

Perkebunan kayu manis di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di tujuh kabupaten, yaitu OKU, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, OKU Selatan, Muara Enim dan Pagar Alam. Luas total areal perkebunan kayu manis mencapai 1.308 hektar pada tahun 2012 dan menjadi 1.211 hektar pada tahun 2014. Total produksi kulit kayu manis kering pada tahun 2012 mencapai 1.127 ton dan pada tahun 2014 sebesar 1.066 ton.

Perkebunan aren di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Lubuk Linggau, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan dan Muara Enim. Luas total areal perkebunan aren mencapai 1.082 hektar pada tahun 2012 dan menjadi 961 hektar pada tahun 2014. Total produksi gula merah pada tahun 2012 mencapai 319 ton dan pada tahun 2014 sebesar 314 ton.

Perkebunan gambir di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di Musi Banyuasin dengan luas total mencapai 566 hektar pada tahun 2012 dan menjadi 610 hektar pada tahun 2014. Total produksi getah kering gambir pada tahun 2012 mencapai 197 ton dan pada tahun 2014 sebesar 389 ton

Perkebunan kapuk di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di enam kabupaten, yaitu Ogan Ilir, OKI, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim dan Prabumulih. Luas total areal perkebunan kapuk mencapai 473 hektar pada tahun 2012 dan menjadi 447 hektar pada tahun 2014. Total produksi serat kapuk berbiji pada tahun 2012 mencapai 125 ton dan pada tahun 2014 sebesar 117 ton.

Perkebunan vanili di Sumatera Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat (PR). Perkebunan tersebut tersebar di Pagar Alam dan OKU Selatan dengan luas total mencapai 33 hektar pada tahun 2012 dan 2014. Total produksi polong kering vanili pada tahun 2012 mencapai 10 ton dan pada tahun 2014 sebesar 9 ton.

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar penduduknya sangat bergantung pada sektor ini, terutama dalam hal penyediaan hasil tanaman pangan, baik padi, palawija, maupun hortikultura. Sebanyak 88 jenis tanaman pangan

dibudidayakan dan tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis padi yang dibudidayakan terdiri atas padi sawah dan padi ladang, sementara jenis palawija berupa jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan berupa tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan obat-obatan. Pada tahun 2010 dan 2014, total luas panen padi, palawija dan hortikultura berturut-turut mencapai 1.463.868 hektar dan 1.242.652 hektar, sedangkan total jumlah produksi palawija mencapai 19.319.699 ton dan 10.520.395 ton.

Persawahan

Di Sumatera Selatan luas hamparan sawah dalam kurun waktu 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data sensus statistik menyebutkan pada Tahun 2009, luasnya mencapai 611.072 ha, tahun berikutnya bertambah mencapai 629.355 ha pada Tahun 2011, kemudian menurun lagi hingga 612.424 ha pada Tahun 2013. Pada lima tahun terakhir ini diharapkan luas persawahan akan meningkat lagi sejalan dengan upaya pemerintah melakukan program khusus peningkatan produksi padi dengan cara intensifikasi dan pencetakan sawah baru.

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan dalam satu dasawarsa (2003-2012) luasan panen rata-rata padi sawah 658.676,7 Ha. Kedua jenis tipologi lahan memiliki potensi dalam pengembangan tanaman pangan termasuk pengembangan varietas padi lokal. Varietas padi lokal adalah varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu dan di Sumatera Selatan pemanfaatan padi lokal ini umumnya sebagai bahan pangan dalam bentuk beras. Varietas padi lokal yang tumbuh pada tipologi lahan yang berbeda dengan karakteristik tanah yang berbeda tentu saja akan memiliki perbedaan pada karakteristiknya. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi sifat unggul yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam pemanfaatan kedepannya.

Pertanian Lahan Kering

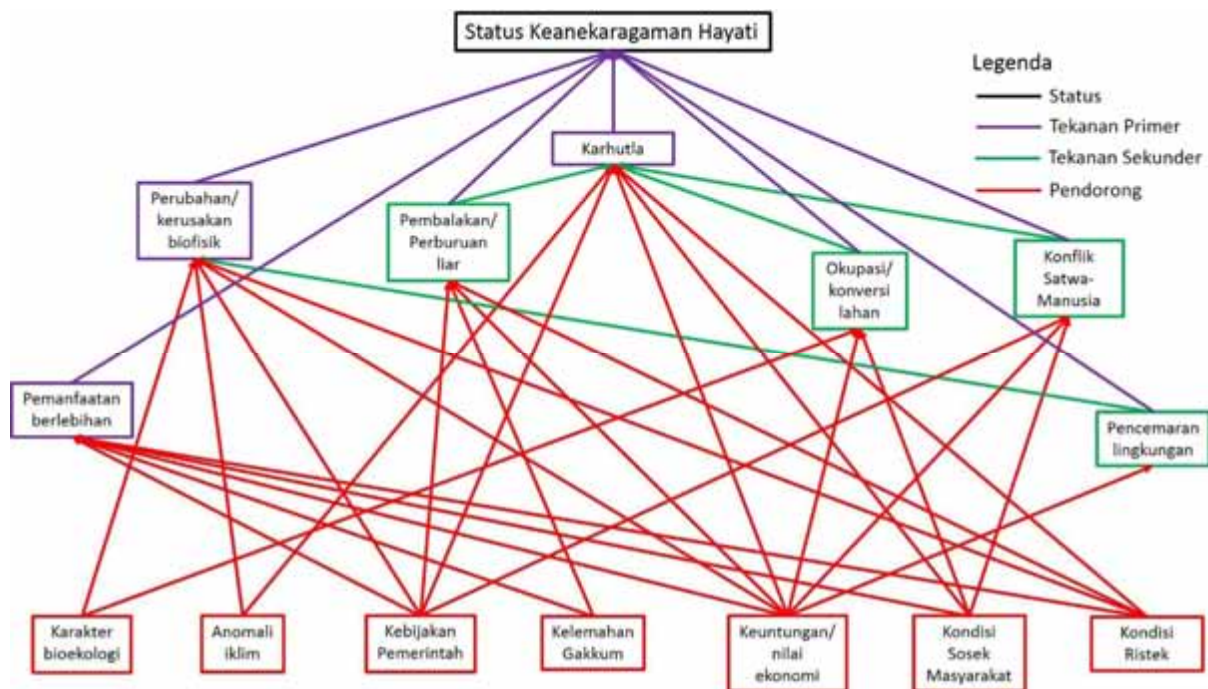
Pertanian lahan kering berpotensi bagi sumber daya genetik tanaman pertanian dan perkebunan di Sumatera Selatan. Lahan ini tersebar di enam kabupaten yaitu Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, dan Musi Rawas. Lahan kering di Sumatera Selatan termasuk lahan kering masam dengan karakteristik tanah sebagai berikut; masam ($\text{pH} < 5$), BO rendah, KB $< 50\%$ (dystrik), Al tinggi, regim kelembaban tanah udik, CH > 2.000 mm/th, tingkat kesuburan dan produktivitas lahan rendah sehingga perlu input cukup tinggi. Kendala dalam pemanfaatan lahan kering masam ini yaitu a) ketersediaan air, b) kemasaman tanah tinggi (pH rendah), c) BO rendah dan solum dangkal, d) sangat miskin unsur hara, dan e) tanah berbatu. Selain tanaman padi lokal, pada ekosistem terestrial ditemukan juga sumber daya genetik tanaman buah-buahan antara lain, duku, durian, manggis, nangka, pisang, nanas spesifik unggulan Sumatera Selatan.

DRIVER, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE

Analisis Driver, Pressure, State, Impact dan Pressure banyak digunakan sebagai alat analisis dinamika keanekaragaman hayati. Pada penyusunan Sehati, menentukan *Driver* (Pendorong), *Pressure* (Tekanan), *State* (Status), *Impact* (Dampak) and *Response* (Respon) disingkat DPSIR dikumpulkan melalui sebuah FGD. Rangkaian FGD tersebut telah mengidentifikasi pendorong dan

tekanan (D dan P) yang menyebabkan status dan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Tujuh macam pendorong (D) teridentifikasi telah menyebabkan terjadinya empat macam tekanan sekunder/*secondary pressures* (SP) sekaligus bagian dari tujuh macam tekanan primer/*primary pressures* (PP) terhadap status keanekaragaman hayati. Ketujuh macam pendorong, yaitu **karakter biologi, anomali iklim, kebijakan pemerintah, kelemahan penegakkan hukum, keuntungan/nilai ekonomi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kondisi riset dan teknologi**. Empat macam tekanan sekunder, yaitu **pembalakan/perburuan liar, okupasi/konversi lahan, konflik satwa-manusia, dan pencemaran lingkungan**. Keempat tekanan sekunder tersebut bersama-sama tiga tekanan primer, yaitu **pemanfaatan berlebihan, perubahan/kerusakan biofisik, dan kebakaran hutan dan lahan**, merupakan tekanan primer terhadap status keanekaragaman hayati di Provinsi Sumatera Selatan.

Keseluruhan pendorong dan tekanan tersebut secara bersama-sama telah menyebabkan penurunan status keanekaragaman hayati di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Pusat melalui lembaga-lembaga riset maupun unit-unit pelaksana teknisnya dan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memiliki program-program pelaksanaan pembangunan yang masih terbatas cakupannya dalam mengatasi penyebab penurunan status keanekaragaman hayati., namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Faktor-faktor pendorong dan tekanan masih terus berlangsung sehingga mengancam kelestarian kehari sumatera selatan (Gambar 3).



Gambar 3. Pendorong (Drivers), Tekanan (Pressures) dan Status (State) Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: FGD Fasilitasi Penyusunan SeHati Sumsel, 2016)

PROGRAM DAN RENCANA AKSI

Mengelola penyebab tidak langsung (pendorong) dan penyebab langsung (tekanan) kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati

Penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan

Data empiris menunjukkan tingkat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan mengalami kecenderungan peningkatan. Karhutla yang terjadi menyebar di seluruh kabupaten di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, namun bila diperhatikan pola distribusi kejadiannya, kejadian karhutla paling luas dan sering terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Daerah ini merupakan rawa dan rawa gambut yang mudah terbakar pada musim kering. Selain itu di daerah ini terdapat budaya yang dapat memicu kejadian kebakaran, yaitu sonor. Sonor adalah budaya yang turun temurun dan merupakan kekhasan wilayah Ogan Komering ilir, sehingga program dan rencana aksi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap karhutla, yaitu (a) Penyuluhan tentang karhutla kepada petani yang masih melakukan sonor, (b) Introduksi Teknologi Pertanian pasang surut (Demplot Budidaya Agrosilvofishery/ Wana Mina Tani), (c) Pembentukan masyarakat peduli api (MPA) dan (d) Peningkatan patroli keamanan hutan. Program dan rencana aksi tersebut di atas dilaksanakan pada daerah-daerah prioritas, yang disusun berdasarkan hasil program pemetaan daerah rawan kebakaran. Pada kasus kasus karhutla yang disebabkan oleh perusahaan maka penegakan hukum perlu semakin ditegakkan.

Beberapa program di atas sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknisnya dan diharapkan akan terjalin koordinasi dan sinkronisasi program diantara pihak terkait agar penanganan dan pencegahan karhutla memberikan dampak yang lebih signifikan.

Penanganan pembalakan/ perburuan liar

Pembalakan liar terjadi baik di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Di Sumatera Selatan pembalakan dan okupasi lahan terjadi di Taman Nasional Sembilang (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Suaka Margasatwa Bentayan (SM Bentayan), Suaka Margasatwa Dangku (SM Dangku), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (SM Gumai Pasemah), Suaka Margasatwa Gunung Raya (SM Gunung Raya), Suaka Margasatwa Isau-isau Pasemah (SM Isau-isau Pasemah), Suaka Margasatwa Padang Sugihan (SM Padang Sugihan), PT. Reki dan PT. GAL. Berbagai usaha telah dilakukan oleh BKSDA maupun pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut, namun belum secara spesifik ditujukan untuk menangani pembalakan dan perburuan liar. Hal ini menyebabkan program belum menampakkan hasil yang maksimal.

Pembalakan liar/perburuan liar disebabkan oleh dorongan keuntungan ekonomi, juga karena penegakan hukum yang lemah, vonis yang ringan, kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS sehingga kasus tidak tertangani. Sebagai tindakan preventif, perlu dilakukan monitoring hutan dengan lebih baik. Pada kasus perburuan liar, selain penyebab tersebut di atas, kesadaran masyarakat akan nilai konservasi satwa liar juga masih sangat rendah. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah masih sangat rendah.

Mempertimbangkan hal di atas maka program dan rencana aksi untuk penanganan pembalakan liar dan perburuan liar adalah peningkatan patroli keamanan, penegakan hukum yang tegas, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kehati, peningkatan jumlah PPNS, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PPNS. Diharapkan program/rencana aksi ini akan mampu menurunkan kasus pembalakan/perburuan liar di areal prioritas, yaitu di kawasan lindung dan konservasi.

Resolusi konflik satwa-manusia

Ekspansi perkebunan, pertanian dan pemukiman (transmigrasi) baik yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah atau secara sporadis oleh masyarakat menyebabkan perubahan habitat alami yang berada dalam jalur wilayah jelajah satwaliar menjadi lahan perkebunan/pertanian. Hal ini telah terbukti memicu konflik antara satwaliar dan masyarakat, ketika satwaliar berpindah melalui jalur tersebut. Konflik ini sering menyebabkan kerusakan rumah, lahan pertanian, perkebunan, hingga kematian satwa atau anggota masyarakat. Berbagai respon telah dilakukan oleh pemerintah/BKSDA ataupun LSM, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kapasitas masyarakat dan perusahaan dalam menangani konflik dan pentingnya kehati perlu ditingkatkan melalui pembinaan/penyuluhan kepada perusahaan/desa yang dilalui jalur jelajah satwa (gajah, harimau). Pada sisi pemerinatah, penambahan jumlah petugas dan frekuensi patroli, dan pembentukan satgas/reaksi cepat penanganan konflik satwa-manusia juga diperlukan.

Penanganan pemanfaatan/eksploitasi berlebihan dan peredaran/perdagangan tumbuhan dan satwaliar

Keuntungan ekonomi yang besar mendorong sekelompok orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip konservasi walaupun tidak melanggar hukum, misalnya pemanenan/pemanfaatan berlebihan spesies flora dan fauna di Sumatera Selatan. Untuk menangani masalah ini aksi yang diperlukan adalah pengaturan pemanfaatan tumbuhan dan satwaliar di alam dan pelepasliaran (*restocking*) spesies satwaliar, baik untuk spesies dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi. Selain itu perlu dilakukan penanaman kembali spesies tumbuhan, baik untuk spesies dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi. Rencana aksi dan program ini diharapkan akan mampu meningkatkan populasi spesies di alam. Tentu saja hal ini perlu didukung dengan program penelitian/upaya penangkaran spesies dilindungi maupun tidak dilindungi tetapi statusnya terancam/bernilai ekonomi. Pada kasus pemanfaatan dan peredarat tumbuhan dan satwaliar secara illegal, perlu peningkatan patroli keamanan hutan dan penegakkan hukum.

Penanganan perambahan/ okupasi dan konversi lahan

Kerusakan habitat terjadi baik di kawasan hutan konservasi dan hutan produksi, misalnya Taman Nasional Sembilang (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Suaka Margasatwa Bentayan (SM Bentayan), Suaka Margasatwa Dangku (SM Dangku), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (SM Gumai Pasemah), Suaka Margasatwa Gunung Raya (SM Gunung Raya), Suaka Margasatwa Isau-isau Pasemah (SM Isau-isau Pasemah), Suaka Margasatwa Padang Sugihan (SM Padang Sugihan), PT. Reki dan PT. GAL. Kerusakan habitat ini disebabkan oleh pembalakan liar,

perambahan/ekspansi lahan pertanian, dan kebakaran hutan. Kerusakan habitat tersebut memicu kepunahan spesies sehingga perlu mendapat penanganan prioritas.

Untuk tindakan preventif, program perlu dilakukan patroli lebih intensif dengan melibatkan perusahaan, pemerintah dan LSM. Untuk meningkatkan kinerja patroli, perlu dipertimbangkan penambahan personil dan fasilitas untuk monitoring. Bila ditemukan kasus baru, perlu dilakukan tindakan penegakan hukum yang tegas, sedangkan pada kasus okupasi lahan yang sudah bertahun-tahun perlu mediasi sehingga dapat dicapai kesepakatan yang terbaik. Diharapkan program ini mapu mengurangi jumlah kasus okupasi illegal/konflik tenurial.

Meningkatkan status keanekaragaman, menjaga ekosistem essential, dan keanekaragaman spesies

Rehabilitasi/Restorasi Ekosistem Penting

Sumatera selatan kaya akan tipe ekosistem essential dan penting, yaitu ekosistem marin, pesisir pantai, gambut, lebak lebung, mangrove, riparian, hutan lahan kering dataran rendah dan hutan dataran tinggi. Pada berbagai ekosistem ini dapat dijumpai berbagai keanekaragaman hayati flora, mamalia non primata, primata, reptilia, amfibi, burung, dan biota perairan lainnya, yang mempunyai status konservasi beragam dari yang tidak dilindungi hingga terancam (*kritis/Critically Endangered/CR*, terancam/*Endangered/EN*, rentan/*Vulnerable/VU*).

Semua tipe ekosistem tersebut dalam dekade terakhir menghadapi berbagai tekanan sehingga luas hutannya mengalami penurunan atau terdegradasi. Hal ini tentu akan membahayakan kelestarian spesies yang berada pada habitat tersebut, sehingga perlu dilakukan program dan rencana aksi penyelamatan. Pada hutan yang mengalami degradasi perlu direklamasi/rehabilitasi/direstorasi sehingga kondisinya membaik dan daya dukungnya meningkat. Pada ekosistem rawa terdapat lebak lebung, sebuah tempat berkumpulnya berbagai spesies ikan pada musim kemarau. Tempat ini secara ekologis sangat penting, namun sampai dengan saat ini belum ada informasi mengenai jumlah/luas dan distribusinya serta spesies ikan yang ada. Secara turun temurun, masyarakat memanen ikan-ikan tersebut. Dikhawatirkan, akan terjadi kelangkaan spesies ikan bila terjadi pemanenan yang berlebihan, tanpa diikuti dengan budidaya maupun pengaturan pemanenannya.

Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi

Dari proses FGD diketahui bahwa data dan informasi mengenai keberadaan spesies kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi masih sangat terbatas, padahal informasi ini sangat berguna sebagai dasar untuk pengelolaan habitat dan populasinya. Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan program/rencana aksi untuk indentifikasi, inventarisasi dan pemetaan keberadaan spesies secara spasial di berbagai tipe ekosistem tersebut. Berdasarkan data tersebut, upaya konservasi insitu maupun eksitu dapat direncanakan dan dilakukan terhadap spesies-spesies prioritas yang telah diidentifikasi dalam FGD, yaitu pada mamalia non primata (Gajah, Harimau, Tapir, Pelanduk, Beruang madu, Trenggiling), burung (Enggang Gading, Elang, Raja Udang, Burung migran), dan Herpetofauna (Buaya Sinyulong, Buaya Muara, Biyuku).

Selain dari spesies tersebut, spesies yang tidak dilindungi namun sangat bernilai ekonomi cenderung mengalami eksploitasi yang berlebihan yang mengancam kelestariannya, sehingga spesies-spesies ini pun perlu dikonservasi. Spesies satwa bernilai ekonomi tinggi yang perlu dikonservasi adalah Rusa (*Rusa unicolor*), Kijang (*Muntiacus muncak*), Ikan Tapah, Ikan Belida, Ikan Sembilang, Belangkas, dan Lobster. Sedangkan untuk tumbuhan, prioritas konservasi pada spesies-spesies padi lokal (selebur rimbe, karat kaleng, dahat, beram, pulut, tambuna, henika, dayang rindu, gilas madu), dan buah-buahan khas Sumatera Selatan, seperti duku dan manggis.

Mendorong dan mengembangkan upaya pemanfaatan dan peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan peningkatan peran ilmu serta teknologi

Pengembangan Ekowisata

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi keindahan lanskap yang beragam (hutan, danau, pesisir, dan atraksi satwa) serta peninggalan historis Kerajaan Sriwijaya yang sangat penting. Potensi belum sepenuhnya dioptimalkan pemanfaatannya. Belum ada program terintegrasi yang mengaitkan antara keanekaragaman hayati dengan ekowisata, padahal potensinya sangat besar. Program pengembangan ekowisata diharapkan akan mampu menambah pendapatan daerah dan masyarakat, sehingga akan mengurangi tekanan eksploitasi sumberdaya alam. Rencana aksi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan studi potensi ekowisata di Provinsi Sumatera Selatan, melengkapi sarana dan prasarana serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pengembangan ekowisata, dan promosi ekowisata.

Perlindungan dan pemuliaan kehati unggulan

Provinsi Sumatera Selatan juga sangat terkenal dengan duku dan manggisnya. Duku dan manggis dipanen dari kebun yang pada umumnya sudah berusia tua yang diwariskan dari leluhurnya. Sampai dengan saat ini belum ada tindakan untuk merehabilitasi dengan teknik budidaya yang benar. Untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas duku perlu dilakukan revitalisasi tanaman duku dan manggis. Beberapa penelitian dasar mengenai budidaya secara vegetatif, supaya rasa duku tidak berubah, perlu dilakukan.

Selain duku dan manggis, dapat dijumpai berbagai spesies padi lokal yang dibudidayakan secara turun temurun. Data menunjukkan keragaman padi lokal ini secara konsisten terus menurun, namun belum ada program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengingat potensi keanekaragaman hayati padi sangat penting dalam pemuliaan, maka perlu pembinaan petani dan koleksi plasma nutfah tersebut.

Pembinaan kearifan tradisional

Provinsi Sumatera Selatan memiliki budaya dan kearifan tradisional yang sampai saat ini masih dipraktikkan di beberapa daerah, seperti sonor, lebak lebung, dan budidaya duku dan manggis. Walaupun demikian, kearifan tradisional ini memiliki risiko merusak habitat dan menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati jika tidak dilaksanakan dengan benar, misalnya sonor dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan lebak lebung dan pemanenan duku dan manggis dapat menyebabkan kelangkaan spesies ikan, duku dan manggis. Oleh karena itu,

diperlukan pembinaan terhadap masyarakat yang masih melakukan sonor untuk meningkatkan produktivitas lahan dan berkelanjutan, tanpa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Revitalisasi pohon-pohon duku dan manggis dan insentif untuk petani duku dan manggis juga diperlukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati duku dan manggis.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati

Permasalahan konservasi keanekaragaman hayati selain disebabkan oleh tekanan masyarakat, mungkin bisa terjadi dari adanya peraturan yang berlawanan dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati. Selama ini belum ada dokumen/laporan yang mengulas terkait dengan isu tersebut. Sehingga menjadi sangat perlu dilakukan analisis kebijakan terkait dengan peraturan yang berlawanan dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan baik, peraturan pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Seyogyanya peraturan yang berlawanan dengan prinsip konservasi dapat diusulkan untuk dicabut. Sebaliknya, perlu disusun peraturan yang memberikan insentif kepada masyarakat, perusahaan, dan lembaga yang mendukung konservasi.

Kurang maksimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ketidakpatuhan masyarakat/swasta terhadap peraturan yang ada sering juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, yang dilatarbelakangi kurangnya pemahaman hakim/jaksa/PPNS terhadap permasalahan lingkungan/konservasi keanekaragaman hayati. Belum ada program/kegiatan yang dibuat untuk menanggulangi masalah ini. Program pelatihan pemahaman lingkungan/keanekaragaman hayati kepada mereka diharapkan mampu meningkatkan kinerja lingkungan/konservasi kehati.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi program melalui upaya partisipatif dan kolaboratif

Luasnya cakupan wilayah pengelolaan dan terbatasnya petugas serta sarana/prasarana untuk patroli keamanan hutan menyebabkan rendahnya efektivitas konservasi keanekaragaman hayati. Penambahan jumlah personil dalam jumlah singkat juga tidak memungkinkan, karena keterbatasan pendanaan, sehingga perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat/swasta untuk menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan advokasi dan menyertakan masyarakat/swasta dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Berlatar belakang hal ini maka program dan rencana aksi peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan swasta perlu dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan.

Tabel 1 Program dan Rencana Aksi untuk mencapai Tujuan 1: Mengelola penyebab tidak langsung (pendorong) dan penyebab langsung (tekanan) kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
1	Penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan	Pemetaan Daerah Rawan kebakaran					Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin Kab. Musi Banyuasin	Terpetakan daerah rawan kebakaran	Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan, Pihak Pendukung: Balai PPI & KHL, BPBD ,Dinas Perkebunan, BKSDA , Balai Taman Nasional, TNI Kepolisian, Pengadilan Negeri, PPNS, Perusahaan swasta, LSM, Masyarakat,	
		Penyuluhan tentang karhutla kepada masyarakat						Penurunan jumlah kebakaran		
		Pembentukan desa peduli api dan model strategy pencegahan						Jumlah desa peduli api		
		Pembentukan Sistem Koordinasi penanggulangan Karhutla						Terbentuknya sistem koordinasi dan implementasinya		
		Introduksi Teknologi Pertanian pasang surut (Demplot Budidaya Agrosilvofishery/ Wana Mina Tani)						Peningkatan jumlah petani yang mengadopsi teknologi		
		Pembentukan kelompok masyarakat peduli api (KMPA) & peningkatan kapasitas						Peningkatan jumlah KMPA dan personil resmi yang mengikuti pelatihan Karhutla		
		Peningkatan patroli keamanan hutan						Peningkatan jumlah petugas dan frekuensi patroli karhutla		
		Penegakan hukum						Penurunan kasus penyidangan masalah karhutla		
		Peningkatan patroli keamanan hutan terpadu (gabungan)						Penurunan jumlah kasus		
		Monitoring peredaran hasil hutan kayu						Teridentifikasinya sistem peredaran		
2	Penanganan pembalakan liar	Penegakan hukum					Penurunan jumlah kasus persidangan pembalakan/ perburuan liar	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan)		
		Penegakan hukum					Penurunan jumlah kasus persidangan pembalakan/ perburuan liar			

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
3	Resolusi konflik satwa-manusia	Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kehati					Kab. OKU Selatan, Kab. OKI, Kab. Muba, Kab. Pali, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, dan Muara Enim	Penurunan kasus perburuan satwa	Pihak Pendukung: KPH, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan, LSM & Masyarakat	
		Peningkatan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS						Peningkatan jumlah personil PPNS		
		Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS						Peningkatan kapasitas PPNS dalam menangani kasus Lingkungan		
		Alternative income pada masyarakat di sekitar kawasan (income generating activities)						Tersedianya alternative pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan		
4	Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran/perdagangan tumbuhan dan satwaliar	Peningkatan patroli keamanan hutan					Seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan	Terbentuknya satgas/team reaksi cepat di setiap kabupaten	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: BPPHLHK Wil. Sumatera, Kepolisian Daerah, LSM & Masyarakat, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan.	
		Pembentukan satgas/reaksi cepat penanganan konflik satwa-manusia						Peningkatan jumlah petugas dan frekuensi patroli karhutla		
		Pembinaan/penyuluhan kepada perusahaan dan masyarakat yang dilalui jalur jelajah satwa (gajah, harimau)						Jumlah perusahaan dan kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/penyuluhan.		
		Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kehati dan penanganan konflik satwaliar						Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kehati dan penanganan konflik satwaliar.		
4	Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran/perdagangan tumbuhan dan satwaliar	Monitoring perdagangan tumbuhan dan satwa liar.					Seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan	Teridentifikasi sistem peredaran	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan)	
		Peningkatan patroli keamanan hutan						Peningkatan jumlah petugas dan frekuensi patroli		
		Penegakan hukum						peredaran/perdagangan tumbuhan dan satwa liar		
								Penurunan jumlah kasus		

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
								<p>persidangan masalah eksploitasi, peredaran, dan perdagangan satwaliar</p> <p>Terbentuknya/penyempurnaan aturan/perda mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwaliar di alam, baik di kawasan hutan/non-kawasan hutan</p> <p>- Jumlah penangkaran spesies dilindungi dan tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi.</p> <p>- Jumlah spesies yg berhasil ditangkarkan</p> <p>Jumlah spesies yang dilepasliarkan ke alam, baik spesies dilindungi dan tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi.</p> <p>Jumlah spesies tumbuhan yang ditanam di alam, baik untuk spesies dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi.</p> <p>Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi/penyuluhan</p>	<p>Pihak Pendukung: Pemerintah Daerah, BPPHLHK Wil. Sumatera, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bea Cukai, Badan Karantina Pertanian kelas 1, Dinas Perdagangan, Kepolisian Daerah, PPNS, BKSDA, LSM & Masyarakat</p>	
		<p>Pengaturan pemanfaatan tumbuhan dan satwaliar di alam termasuk didalamnya sistem lebak lebung</p> <p>Penelitian/upaya penangkaran spesies dilindungi maupun tidak dilindungi tetapi statusnya terancam/bernilai ekonomi</p> <p>Pelepasliaran (<i>Restocking</i>) spesies satwaliar, baik untuk spesies dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi.</p> <p>Penanaman kembali spesies tumbuhan, baik untuk spesies dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang statusnya terancam/bernilai ekonomi.</p> <p>Penyadartahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya Kehati</p>								
5	Penanganan perambahan/okupasi dan	Mediasi masalah konflik tenurial melalui skema PIAPS dan TORA					Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam,	Jumlah konflik tenurial yang telah diselesaikan/dimediasi	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional &	

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
	konversi lahan						Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK.	melalui PIAPS dan TORA Tersedianya peta indikatif	BKSDA Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan)	
		Pemetaan indikatif kawasan rawan pembalakan liar dan perambahan						Peningkatan jumlah petugas dan frekuensi patroli ilegal logging	Pihak Pendukung: BPPHLHK Wil. Sumatera, Kepolisian Daerah, Pengadilan Negeri, PPNS, LSM, IUPHHK.	
		Peningkatan patroli keamanan hutan						Penurunan kasus penyidangan masalah konflik tenurial		
		Penegakan hukum								

Tabel 2 Program dan Rencana Aksi untuk mencapai Tujuan 2: Meningkatkan status keanekaragaman spesies, menjaga ekosistem essential, dan sumberdaya genetik

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
1	EKOSISTEM									
a	Konservasi ekosistem marin	Identifikasi dan inventarisasi status biota perairan dan terumbu karang					Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir	Tersedianya daftar spesies biota perairan dan terumbu karang	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA)	
b	Konservasi Mangrove	Identifikasi spesies, tingkat degradasi, distribusi/pemetaan dan luas mangrove					Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir Taman Nasional Berbak & Sembilang	Tersedianya daftar spesies mangrove Tersedianya data dan peta distribusi dan luas mangrove	Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan)	
		Rehabilitasi/Restorasi mangrove					Taman Nasional Berbak & Sembilang, HL Air Telang, HL Sungai Lumpur	Tersedianya data degradasi mangrove Meningkatnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove	Pihak Pendukung: LSM, Perusahaan perkebunan, Perusahaan Pertambangan, IUPHHK, perguruan tinggi, Forum DAS Sumsel, BRG/TRG,	

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
c	Hutan Pantai	Identifikasi dan inventarisasi status					Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir Taman Berbak & Sembilang	Tersedianya spesies dan hutan pantai	daftar distribusi	
		Rehabilitasi hutan pantai					Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir Taman Berbak & Sembilang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hutan pantai		
d	Konservasi Riparian	Identifikasi dan inventarisasi status riparian					Semua Kabupaten	Tersedianya data distribusi dan luas riparian		
		Rehabilitasi daerah riparian						Tersedianya data daftar spesies riparian		
									Tersedianya data degradasi riparian	
e	Restorasi dan rehabilitasi Gambut	Rehabilitasi daerah riparian					Semua Kabupaten	Meningkatnya tutupan hutan di riparian sesuai dengan fungsinya (kanan kiri sungai)		
								Tersedianya peta dan data mengenai luas, distribusi, kedalaman, tingkat kematangan dan hidrologi gambut		
		Restorasi/Rehabilitasi					Kab. Muba, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas	Membaiiknya ekosistem lahan gambut		
f	Lebak Lebung	Inventarisasi, distribusi dan luas				Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muba, Kab. Ogan Ilir, Kab. Musi Rawas	Tersedianya data luas dan distribusi lebak lebung			
2	FLORA									

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
a	Pengendalian ancaman spesies flora asing invasif	Identifikasi dan distribusi spesies asing invasif (<i>invasive alien species</i>)					Taman Nasional, Margasatwa, Suaka Alam, Hutan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK.	Tersedianya daftar spesies asing invasif (<i>invasive alien species</i>)	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan, IUPHHK.	
		Pemetaan distribusi spasial spesies asing invasif (<i>invasive alien species</i>)						Tersedianya data distribusi spasial spesies asing invasif (<i>invasive alien species</i>)		
b	Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi	Eradikasi dan restorasi habitat					Tersedianya data populasi spesies yang mempunyai status IUCN kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi	Tidak ada spesies invasif di dalam kawasan konservasi	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan, IUPHHK.	
		Inventarisasi populasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi						Tersedianya data flora yang memiliki status IUCN kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi		
		Pemetaan kondisi dan distribusi habitat spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi							Penanggung Jawab: Balitbangovda,	
		Peningkatan konservasi ek-situ melalui pembangunan					Seluruh kabupaten/kota	Peningkatan luas/jumlah kawasan konservasi eksitu		

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
		arboretum, kebun raya, taman kehati, hutan kota						dan jumlah koleksi jenis	Pihak Pendukung: LPI, Dishut, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan, Dinas PU, Dinas LH, BPTP, Perguruan tinggi	
3	MAMALIA NON PRIMATA									
	Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi (terutama: Gajah Harimau Tapir Pelanduk Beruang madu Trenggiling)	Pemetaan dan inventarisasi kantong-kantong habitat Pemetaan Wilayah Jelajah (<i>home range</i>)					Seluruh Kabupaten/Kota, Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi, IUPHHK RE/HTI, Perkebunan	Tersedianya data peta distribusi kantong-kantong habitat Tersedianya informasi wilayah2 yang dilalui jalur jelajah	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Dinas Perkebunan, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan dan Perusahan Pertambangan Forum Konservasi Gajah Indonesia, Forum Harimau Kita.	
		Survey populasi dan distribusi						Tersedianya data populasi dan distribusinya		
		Rehabilitasi/Restorasi habitat						Peningkatan keanekaragaman kerapatan tegakan		
		Pembangunan koridor habitat, kolaborasi dengan stake holder kunci						Terbangunnya koridor satwa		
		Peningkatan konservasi in situ dan eksitu						Meningkatnya jumlah area untuk konservasi insitu		

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
4	BURUNG Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi (terutama: enggang gading, Elang, Raja Udang, Burung migran)	Pemetaan Distribusi Habitat					Seluruh Kabupaten/Kota, Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK., Perkebunan	Tersedianya distribusi habitat peta	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA Sumsel) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Dinas Perkebunan, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan Pertambangan	
		Survey populasi dan distribusi spesies Rehabilitasi/Restorasi habitat						Tersedianya data populasi dan distribusi spesies Peningkatan keanekaragaman dan kerapatan tegakan		
5	PRIMATA Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi (Siamang, Owa, Ungko)	Peningkatan konservasi in situ dan exsitu					Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK.	Meningkatnya konservasi ex situ dan in situ	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Taman Nasional & BKSDA Sumsel) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Dinas Perkebunan, BPDAS HL, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan	
		Sosialisasi dan penataan penangkaran ilegal						Berkurangnya penangkaran ilegal		
		Survey populasi dan distribusi spesies					Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK.	Tersedianya data populasi dan distribusi	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Taman Nasional & BKSDA Sumsel) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Dinas Perkebunan, BPDAS HL, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan	
		Pemetaan Distribusi Habitat Inventarisasi vegetasi & pakan						Tersedianya data populasi dan distribusi habitat peta Tersedianya data vegetasi dan pakan pada habitat siamang		

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
		Rehabilitasi/Restorasi habitat, Peningkatan konservasi in situ dan exsitu						Peningkatan keanekaragaman kerapatan tegakan Meningkatnya area konservasi ex situ dan in situ	Pertambangan.	
6	REPTILIA									
	Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi (terutama: Buaya Sinyulong, buaya muara, Biyuku)	Survey populasi dan distribusi spesies Pemetaan Distribusi Habitat Rehabilitasi/Restorasi habitat Peningkatan konservasi in situ dan exsitu					Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK.	Tersedianya informasi populasi dan distribusinya Tersedianya peta distribusi habitat Peningkatan keanekaragaman dan kerapatan tegakan Meningkatnya jumlah area	Penanggung Jawab: Kawasan Konservasi (Balai Taman Nasional & BKSDA Sumsel) Luar kawasan Konservasi (Dinas Kehutanan) Pihak Pendukung: Dinas Kelautan dan Perikanan, BPDAS HL, IUPHHK.	
7	Konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik									
	Rusa (<i>R. unicolor</i>) & Kijang (<i>M. muntjak</i>)	Konservasi exsitu melalui usaha pengembangan penangkaran oleh BUMD, masyarakat dan swasta					Seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan	Peningkatan penangkar yang legal jumlah	Penanggung Jawab: BKSDA Sumsel Pihak Pendukung: Dinas Kehutanan, LSM, Pihak Swasta, Masyarakat, Perguruan Tinggi.	

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
	Ikan tapah, ikan Belida, ikan Sembilang, Ikan Gabus, Belangkas, Lobster	<p>Penelitian distribusi dan populasi</p> <p>Penelitian jumlah pemanenan</p> <p>Penelitian domestikasi/ penangkaran eksitu dan pembuatan kolam koleksi (reservat)</p>						<p>Tersedianya data populasi dan distribusi</p> <p>Tersedianya data jumlah pemanenan per tahun</p> <p>Tersedianya teknologi domestikasi dan jumlah kolam koleksi (reservat)</p>	<p>Penanggung Jawab: BPPPU Sumsel</p> <p>Pihak Pendukung: Dinas Kelautan dan Perikanan, Balitbangnovda, Perguruan Tinggi.</p>	
	Padi (selebur rimbe, karat kaleng, dahat, beram, pulut, tambuna, henika, dayang rindu, gilas madu dll.)	<p>Pengembangan konservasi in situ dan eksitu</p> <p>Pembangunan bank kehati (gen bank) untuk padi</p> <p>Program pemuliaan untuk mencari padi pasang surut yang produktivitasnya tinggi</p> <p>Konservasi insitu dan eksitu</p>						<p>Bertambah areal untuk konservasi insitu dan eksitu</p> <p>Tersimpannya koleksi plasma nutfah padi Sumsel</p> <p>Jumlah varietas padi yang dilepas ke masyarakat</p>	<p>Penanggung Jawab: BPTP Sumsel</p> <p>Pihak Pendukung: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perguruan Tinggi.</p>	
	Buah (duku, manggis) dan getah (gambir)	<p>Penelitian teknik budidaya/ perbanyakan tanaman, peningkatan produksi</p> <p>Pemuliaan tanaman</p> <p>Promosi untuk pemasaran ke luar negeri (ekspor)</p>						<p>Bertambah areal untuk konservasi in situ dan eksitu</p> <p>Tersedianya teknik budidaya dan perbanyakan tanaman</p> <p>Dilepasnya varietas</p> <p>Terbukanya pasar export komoditas duku, manggis dan gambir.</p>	<p>Penanggung Jawab: Dinan Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura & Dinas Perkebunan.</p> <p>Pihak Pendukung: Balitbangnovda, BPTP Sumsel, BPDAS HL Sumsel, BPTH, Dinas Perindustrian Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi.</p>	

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
							Raja (Kab. Ogan Komerling Ilir), Desa Lawang Agung (Kec. Kota Agung Kab. Lahat). Duku: Kab. Muara Enim, Ogan Komerling Ilir, Kab. Ogan Komerling Ulu, Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kota Palembang <u>Gambar</u> : Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin.			

Tabel 3 Program dan Rencana Aksi untuk mencapai Tujuan ke 3, 4 dan 5: Mendorong dan mengembangkan upaya pemanfaatan dan peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan peningkatan peran ilmu serta teknologi

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
1	Ekowisata	Studi potensi ekowisata Peningkatan sarana dan prasarana						Seluruh Kabupaten di Sumatera Selatan, Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Suaka Alam, Taman	Daftar lokasi ekowisata potensial Meningkatnya jumlah wisatawan	Penanggung Jawab: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Pihak Pendukung:

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
		<p>Pelatihan pendampingan pengembangan ekowisata dan</p> <p>Promosi ekowisata</p>					<p>Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, KHDTK, IUPHHK.</p>	<p>Tersedianya sumberdaya manusia yang memahami ekowisata</p> <p>Tersedianya media untuk promosi ekowisata</p>	<p>Dinas Kehutanan, BKSDA, Taman Nasional, LSM, IUPHHK dan Perusahaan Swasta.</p>	
2	<p>Pemuliaan kehati unggulan (padi, duku, manggis)</p>	<p>Program pemuliaan untuk mencari padi pasang surut yang produktivitasnya tinggi</p> <p>Program pemuliaan spesies duku dan manggis yang produktivitas dan berkualitas tinggi</p> <p>Revitalisasi pohon-pohon duku dan manggis</p>					<p>Kab. Ogan Komering Ilir : Desa Batu Ampar, Kijang Ulu, Kayuagung, Pematang Beluran, Jejawi Kab. Ogan Ilir : Tanjung Alai, Tanjung Menang, Muaro Baru, Lebak Laut, Sakatiga, Talang Balai Baru, Sukapindah, Muara Penimbung, Ulak kerbau</p> <p>Manggis: Kota Palembang, Kec. Inderalaya (Ogan Ilir), Desa Lukis Rejo (Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu Timur), Kecamatan Kayu Ara (Kab. MUBA), Kec. Sembawa (Kab. Banyuasin), Desa Muara Dua (Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim), Desa Jiwa Baru (Kec. Lubai Kab. Muara Enim), Kec. Tanjung Raja</p>	<p>Jumlah varietas padi yang dilepas ke masyarakat</p> <p>Jumlah spesies duku dan manggis yang produktivitas dan kualitasnya tinggi</p> <p>Jumlah pohon duku dan manggis tua yang direvitalisasi</p>	<p>Penanggung Jawab: BPTP Sumsel</p> <p>Pihak Pendukung: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Balaibangnovda, BPTH, Dinas Kehutanan, Perguruan tinggi, Dinas Sosial, LSM, Masyarakat.</p>	

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
3	Perlindungan terhadap sumberdaya genetik	Pembentukan bank genetik						(Kab. Ogan Komering Ilir), Desa Lawang Agung (Kec. Kota Agung Kab. Lahat). Duku: Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Terbentuknya bank koleksi genetik sumsel Penanggung Jawab: BPTP (Non-Kehutanan) BPTH (Kehutanan) Pihak Pendukung: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Balitbangnovda, Dinas Kehutanan.	
4	Pembinaan kearifan tradisional (padi rawa tradisional, lebak lebung, petani duku dan manggis)	Penyuluhan teknik budidaya padi rawa ramah lingkungan Pembinaan masyarakat yang memiliki budaya memanen lebak lebung agar mempertimbangkan aspek kelestarian spesies					Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ilir : Kec. Pampangan, Keman dan Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Muara Enim	Teknik budidaya yang ramah lingkungan Adanya kesadaran masyarakat untuk memanen secara lestari	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura. Pihak Pendukung: BPTP, BPTH, Dinas Perkebunan, Balitbangnovda, BPDAS HL, Perguruan Tinggi.	

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
		Insentif untuk petani duku dan manggis						<p>Manggis: Kota Palembang, Kec. Inderalaya (Ogan Ilir), Desa Lukis Rejo (Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komerling Ulu Timur), Kec. Kayu Ara (Kab. MUBA), Kec. Sembawa (Kab. Banyuasin), Desa Muara Dua (Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim), Desa Jiwa Baru (Kec. Lubai Kab. Muara Enim), Kec. Tanjung Raja (Kab. Ogan Komerling Ilir), Desa Lawang Agung (Kec. Kota Agung Kab. Lahat). Duku: Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komerling Ilir, Kab. Ogan Komerling Ulu, Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Lahat, Kota Palembang</p>	Tersedianya instrumen yang memberikan insentif kepada petani manggis dan duku	

Tabel 4 Program dan Rencana Aksi untuk mencapai Tujuan 6: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-...)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
1	Analisis Kebijakan	Pengelolaan database kehati					Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Tersedianya database kehati di pusat data (SSBIN)	Penanggung Jawab: Perguruan Tinggi Pihak Pendukung; BAPPEDA Sumsel, Seluruh Dinas di bawah Propinsi Sumatera, BKSDA, Balai Taman Nasional, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan & LSM.	
		Analisis kebijakan konservasi (mendukung, bertentangan dan gap)						Tersedianya informasi tentang masalah konservasi yang belum diakomodir dalam regulasi		Penanggung Jawab: Bappeda Provinsi Pihak Pendukung: Seluruh Dinas di bawah Propinsi Sumatera, BKSDA, Balai Taman Nasional, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan & LSM.
2	Peningkatan kapasitas SDM dalam penegakan hukum	Penyusunan regulasi yang memberikan penghargaan/insentif bagi pelaku yang pro konservasi kehati					Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Terbitnya regulasi sebagai dasar pemberian penghargaan/insentif bagi pelaku yang pro konservasi kehati	Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan Pihak Pendukung: Wil. BPPHLHK Sumatera, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah, Kehakiman.	
		Pelatihan PPNS/Hakim dan Jaksa terhadap permasalahan Lingkungan						Peningkatan pemahaman hakim, jaksa dan PPNS terhadap pentingnya kehati meningkat		

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-..)					Lokasi	Indikator	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
		Peningkatan peran swasta dalam konservasi kehati						Jumlah swasta yang ikut berperan dalam konservasi kehati	Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan Provinsi. Pihak Pendukung: IUPHHK, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan, Taman Nasional, BKSDA Sumsel.	
3	Peningkatan kapasitas PPNS, Perusahaan dan masyarakat dalam menangani konflik satwa	Pelatihan Harimau/Gajah satgas Penyuluhan akan pentingnya keanekaragaman hayati Pelatihan penanganan konflik satwa-manusia bagi PPNS Pelatihan penanganan konflik satwa-manusia bagi perusahaan Pelatihan penanganan konflik satwa-manusia bagi masyarakat					Seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	Jumlah pelatihan dan PPNS yang dilatih Jumlah pelatihan masyarakat yang dilatih dan jumlah PPNS yang terlatih dan dapat menyelesaikan konflik satwa-manusia Jumlah perusahaan yang terlatih dan dapat menyelesaikan konflik satwa-manusia Jumlah kelompok masyarakat yang terlatih dan dapat menyelesaikan konflik satwa-manusia	Penanggung Jawab: BKSDA Pihak Pendukung: Dinas Kehutanan, BPHLHK Wil. Sumatera, Balai Taman Nasional, IUPHHK, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan, LSM, Masyarakat	

Tabel 5 Program dan Rencana Aksi untuk mencapai Tujuan 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat (pribadi/perusahaan) dalam implementasi program melalui upaya partisipatif dan kolaboratif

No.	Program	Rencana Aksi	Target waktu (Tahun ke-)					Lokasi	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab/Pihak Pendukung
			1	2	3	4	5			
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati	Penyuluhan akan pentingnya keanekaragaman hayati						Seluruh Kabupaten Sumatera Selatan	Peningkatan kelompok, konservasi, pecinta alam, siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswa, dan kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi.	Penanggung Jawab: BKSDA Pihak Pendukung: Dinas Kehutanan, Balai Taman Nasional, Dinas Pendidikan, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan, IUPHHK, Perguruan Tinggi, LSM.
2	Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap konservasi kehati	Pembangunan perangkat komunikasi (<i>user interface</i>) yang memungkinkan masyarakat dapat melaporkan kejadian yang berkaitan dengan konservasi kehati						Seluruh Kabupaten Sumatera Selatan	Terbangunnya <i>user interface</i> berbasis android untuk melaporkan kejadian yang berkaitan dengan kasus kehati.	
3	Peningkatan partisipasi swasta terhadap konservasi kehati	Sertifikasi usaha swasta dan masyarakat untuk pemenuhan standar-standar lingkungan, seperti SVLK, HCV(F), ISPO, RSPO, Proper, FSC, dll.						Seluruh Kabupaten Sumatera Selatan	Peningkatan jumlah perusahaan yang mengikuti inisiatif lingkungan seperti SVLK, HCV(F), ISPO, RSPO, Proper, FSC, dll.	

4.	Penyusunan media penyuluhan kehati	Pembuatan leaflet, booklet, film, komik, cerita bergambar, dll.			Seluruh Kabupaten di Sumatera Selatan	Jumlah bahan penyuluh kehati yang dihasilkan	<p>Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan (Luar kawasan konservasi)</p> <p>BKSDA dan Taman Nasional (Kawasan Konservasi)</p> <p>Pihak Pendukung: Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan, IUPHHK, Perguruan Tinggi, LSM.</p>
----	------------------------------------	---	--	--	---------------------------------------	--	---

STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Dengan banyaknya program dan rencana aksi keanekaragaman hayati sebagaimana dipaparkan dalam uraian di atas, diperlukan strategi untuk mengimplementasikannya. Strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Lima strategi untuk mengimplementasikan program dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan secara ringkas dalam sub-bab berikut ini.

Konsensus Bersama bahwa SeHati Sumsel sebagai Dokumen Acuan untuk Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan program/rencana aksi konservasi pada kondisi keterbatasan sumberdaya manusia dan dana memerlukan upaya yang dapat menyelaraskan kegiatan serta menghindari tumpang tindih program agar berjalan dengan efektif dan efisien. SeHati Sumsel (2017-2020) merupakan dokumen yang merangkum status dan kecenderungan perubahan ekosistem serta spesies penting di Sumatera Selatan yang disusun secara partisipatif. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan semua SKPD ketika menyusun program/rencana aksi untuk lembaganya, sehingga implementasinya pun diperlukan konsensus bersama. Implementasi dari upaya menyelaraskan program/rencana aksi dapat diwujudkan dalam bentuk arahan/peraturan gubernur kepada semua SKPD. Hal ini juga menjadi indikator tingkat perhatian pemerintah provinsi terhadap kelestarian kelestarian keanekaragaman hayati.

Pengarusutamaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Setiap Sendi Kehidupan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan agar sikap/tindakan selalu mempertimbangkan dampak kebijakan/program/proyek terhadap keanekaragaman hayati. Target dari upaya ini tidak terbatas kepada perusahaan namun pada masyarakat, baik berkelompok maupun secara individu, dan pemerintah. Sebagai contoh, pada pembangunan infrastruktur, apabila keanekaragaman hayati dipertimbangkan, maka akan dapat mengurangi risiko kerusakan habitat dan kepunahan spesies. Pada kasus ini, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat digunakan sebagai instrumen kontrolnya.

Pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati kepada masyarakat diharapkan akan mampu mengubah perilaku, agar perilaku berubah menjadi pro-lingkungan dan keanekaragaman hayati. Instrumen yang digunakan misalnya advokasi melalui media masa/ pelatihan atau muatan kurikulum lokal di sekolah dasar dan menengah. Perubahan sikap kolektif masyarakat akan berdampak besar terhadap upaya konservasi, karena ketidaktahuan terhadap pentingnya keanekaragaman hayati menjadi akar masalah berbagai persoalan keanekaragaman hayati yang besar seperti perburuan liar, ilegal logging, perambahan kawasan dan lain-lain.

Pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati pada pemerintah pada dasarnya adalah memasukkan unsur konservasi keanekaragaman hayati dalam setiap rencana pembangunan, untuk

jangka panjang, menengah, dan terutama jangka pendek. Pembangunan harus berwawasan lingkungan dan konservasi, untuk mencegah terjadinya kerusakan dan hilangnya habitat maupun kepunahan spesies yang terjadi tanpa disadari sebagai akibat dari program pembangunan. Pengarusutamaan ini tidak hanya dilakukan pada dokumen perencanaannya (RPJMP, RPJMD, dll.) tetapi juga kepada para pelaksana pembangunan tersebut, yaitu SKPD dan para pegawai pemerintahan daerah. Selain itu, pengarusutamaan juga perlu tercermin dalam aspek pendanaannya yang mendukung program pembangunan berwawasan konservasi keanekaragaman hayati. Misalnya, untuk dalam melaksanakan tugas keseharian, pegawai memerlukan kertas. Namun, dengan pembangunan berwawasan lingkungan/konservasi keanekaragaman hayati, pemakaian kertas dikurangi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya surat-menyurat, formulir-formulir, dll. terkait administrasi lainnya dilakukan melalui surat elektronik yang tidak memerlukan pencetakan menggunakan kertas. Pendanaan untuk program ini adalah mengadakan perangkat teknologi, namun mengurangi pembelian kertas, tinta, dan alat pencetak (*printer*). Dengan melakukan program ini, pemerintah daerah dapat mengurangi pemakaian kertas, yang berarti mengurangi jumlah kertas yang dibeli, mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang, dan seterusnya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Prioritas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pada satu sisi, disadari bahwa masalah keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan sangat kompleks dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah keanekaragaman hayati yang belum seluruhnya teridentifikasi. Pada sisi lain, terdapat keterbatasan sumberdaya manusia dan dana. Mempertimbangkan hal ini, perlu ditetapkan prioritas masalah yang bisa diatasi. Masalah prioritas dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria: (a) urgensi/tingkat kepentingan, (b) dampak, dan (c) risiko yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Urgensi adalah tingkat keterdesakan pemecahan masalah, dampak adalah masalah lingkungan yang ditanggung apabila masalah keanekaragaman hayati /lingkungan tersebut tidak segera ditangani, sedangkan risiko adalah potensi kerugian yang ditanggung pemerintah/masyarakat akibat permasalahan tersebut. Sub-bab 6.4 telah merangkum keanekaragaman hayati prioritas konservasi untuk Provinsi Sumatera Selatan.

Kemitraan dan Kolaborasi

Implementasi program dan rencana aksi sebaiknya dibangun dalam semangat kemitraan dan kolaborasi, karena tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Salah satu sebabnya adalah distribusi satwa/tumbuhan penting tidak hanya berada pada kawasan hutan, tetapi juga berada di wilayah pertambangan, perkebunan, atau di lahan masyarakat. Bahkan untuk satwa dengan wilayah jelajah yang luas, pergerakannya melintas batas kabupaten/Provinsi.

Penghargaan dan Penegakan Hukum

Dalam menangani masalah berkaitan dengan keanekaragaman hayati, ketegasan penegakan hukum adalah penting, namun adanya pemberian penghargaan/apresiasi akan mendorong masyarakat berbuat hal-hal yang positif terhadap keanekaragaman hayati.



giz

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan